

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Indonesia keterlibatan masyarakat dalam partisipasi politik ternyata hanya biasa terlibat dalam kegiatan pemilu atau pemilihan kepala desa saja, setelah berakhirnya pemilihan umum biasanya keterlibatan masyarakat pun juga ikut berakhir. (Nurfahirah, 2016: 1). Padahal jika dilihat dari perspektif yang lebih luas partisipasi politik merupakan suatu kegiatan yang tentunya harus dilakukan oleh masyarakat dalam berbagai persoalan politik, bukan hanya sekedar keterlibatan dalam kegiatan pemilu saja.

Secara umum partisipasi politik merupakan keterlibatan masyarakat dalam berbagai hal politik atau upaya masyarakat secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Maka, dengan adanya keterlibatan masyarakat tersebut berkemungkinan untuk dapat mempengaruhi suatu kebijakan atau suatu keputusan politik yang bersangkutan dengan kehidupan masyarakat (Widayanto, 2020: 3).

Menurut Sahya Anggara (2013: 142) dalam bukunya yang berjudul Sistem Politik Indonesia menyatakan bahwa:

“Partisipasi politik juga merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan memengaruhi kehidupan warga negara, warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang memengaruhi hidupnya dalam keikutsertaan warga negara dalam memengaruhi proses

pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik”.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwasanya di negara demokrasi ini partisipasi politik merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, dikarenakan dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam urusan politik dapat memberikan pengaruh terhadap keputusan pemerintah, karena apa yang diputuskan oleh pemerintah belum tentu keputusan yang terbaik untuk masyarakat dengan begitu suatu partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk dapat meluruskannya.

Akan tetapi dalam melaksanakan beberapa bentuk partisipasi politik tidak semua masyarakat mampu melaksanakannya, terutama masyarakat yang berada di pedesaan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor seperti sikap apatis, ketidak pahaman masyarakat akan politik serta status sosial yang dimiliki. Berdasarkan status sosial membuat sebagian masyarakat tidak memiliki keberanian untuk ikut andil berpartisipasi politik secara langsung untuk mengawasi, mengkritik serta mengajukan protes terhadap aparatur dan kebijakan pemerintah yang tidak sesuai. Oleh sebab itu, masyarakat membutuhkan media yang dapat mengatasi permasalahan tersebut yang mana salah satu solusinya ialah memanfaatkan perkembangan teknologi digital.

Kemajuan teknologi digital yang semakin pesat kini telah mampu mengubah gaya dan cara masyarakat dalam bertindak. Teknologi digital itu sendiri merupakan perangkat teknologi komunikasi dan informasi yang paling modern serta paling canggih yang mana teknologi digital ini juga sudah terbukti dapat memberikan pengaruh terhadap partisipasi warga negara.

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan dari teknologi digital ini terutama internet dan media sosial telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk partisipasi politik. Masyarakat kini memiliki akses yang mudah dan cepat untuk berbagi informasi, berdiskusi, dan mengorganisir aksi politik melalui media digital.

Dapat dilihat dengan berperan aktifnya masyarakat memanfaatkan kemajuan teknologi digital bisa memberikan tujuan sosial yang positif, sebagai reaksi atas sikap kesewenang-wenangannya institusi negara. Seperti halnya pada fenomena Penyelamatan ketua KPK (yang dikenal dengan perseteruan Buaya vs. Cicak) dari jeratan Polri, fenomena Gerakan Koin untuk Prita di Facebook, serta kisah *The Arab Spring* dapat dikatakan sebagai tanda bahwa teknologi digital menjadi sarana pemanfaatan untuk perubahan masyarakat dan sistem politik. Dari contoh tersebut bisa dilihat atau dijadikan sebagai peluang untuk dapat memperkuat partisipasi politik demokrasi dengan mengoptimalkan pemanfaatan media sosial di era digital. (Heryanto 2018: 323)

Menurut Andriadi dalam buku *Partisipasi Politik Virtual* (2017: 9) menyatakan bahwa kehadiran teknologi digital bukan hanya sekedar merevolusi strategi komunikasi politik, akan tetapi juga sebuah cara partisipasi politik masyarakat. Keterbukaan serta interaktif yang ada pada internet berpotensi untuk dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Masyarakat akan terpacu untuk berpartisipasi politik dikarenakan alat yang mereka gunakan pasti akan lebih mudah, efektif dan tidak monoton.

Partisipasi politik dengan menggunakan pemanfaatan teknologi digital dapat dikatakan sebagai partisipasi politik digital, yang mana dalam melakukan partisipasinya masyarakat menggunakan media media sosial sebagai sarana untuk dapat menjalankan partisipasi politiknya.

Dalam definisinya media sosial merupakan sarana berbasis teknologi internet yaitu media online yang dapat digunakan oleh penggunanya untuk dapat melakukan berbagai interaksi sosial, komunikasi, kerjasama serta berbagi hal lainnya (Maksudi et al., 2018: 154). Berdasarkan kegunaannya, penggunaan media sosial tidak hanya sekedar bisa digunakan sebagai tempat bereksistensi diri saja, akan tetapi bisa juga dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya, seperti hal nya kepentingan politik yaitu sebagai tempat berpartisipasi mengenai berbagai hal isu-isu politik (Yolanda & Halim, 2020: 30).

Media sosial berperan sebagai alat yang berperan penting dalam suatu partisipasi politik digital, yang mana platform seperti facebook, twitter, instagram, dan youtube sudah memberikan wadah atau sarana bagi masyarakat untuk dapat menyampaikan berbagai opini atau pendapat, memobilisasi masa serta melakukan partisipasi dalam diskusi politik secara online. Selain itu kini masyarakat yang memanfaatkan media sosial dapat lebih mudah untuk berinteraksi dengan aparat pemerintah, berbagai pemimpin politik, kandidat serta berbagai kelompok kepentingan lainnya.

Dengan berbagai kemudahan serta keefektivitasan yang ditawarkan, masyarakat memiliki kesempatan untuk memanfaatkan teknologi digital ini

sebagai sarana partisipasi politik. Maka bukanlah hal yang berlebihan apabila media sosial disebut sebagai salah satu pilar baru baru demokrasi (Andriadi, 2017: 5).

Pada umumnya keterkaitan politik dengan media sosial bukanlah hal yang asing lagi didengar, berbagai peranan media sosial yang mana salah satunya ialah facebook kini sudah dapat dimanfaatkan dalam dunia politik, baik digunakan oleh politisi, kelompok-kelompok tertentu ataupun masyarakat itu sendiri.

Facebook merupakan media petunjuk identitas diri, salah satunya dengan pembaruan status kalimat di profil serta status *background newsfeed* (bagian utama yang sering digulirkan oleh pengguna untuk membuat atau melihat apa yang dibagikan pengguna lain) yang dapat digunakan oleh penggunanya untuk berinteraksi dengan pengguna lainnya dalam jarak jauh (Lestari, 2019: 16). Selain itu facebook juga merupakan salah satu bagian dari media sosial yang mempunyai fitur yang mudah dan sederhana sehingga berbagai kalangan masyarakat mudah menggunakannya.

Menurut Heryanto dalam bukunya yang berjudul *Media Komunikasi Politik* (2018-188) dalam kasus *Century* telah menunjukkan kuatnya kebebasan berdemokrasi di dunia maya, seperti faktanya facebook telah memiliki gaung tersendiri dalam memperkuat tekanan publik. Dalam kasus *Century* facebook telah sukses memerankan tiga hal. *Pertama*, komunitas virtual di facebook telah menunjukkan identitasnya sebagai komunitas pengontrol sekaligus juga kelompok penekan dalam kasus *bailout Bank Century*. *Kedua*, Komunitas

virtual itu tidak terbatas oleh berbagai perbedaan aspek. Orang-orang berinteraksi di facebook tak terhalangi oleh perbedaan letak geografis, ideologi, dan lain sebagainya, sehingga perbincangan mengenai kasus *Century* begitu dinamis. *Ketiga*, memungkinkan terbentuknya kesadaran bersama (*shared group consciosnees*). Setiap orang dapat berinteraksi, bertukar isu sehingga dapat membentuk kesadaran kelompok berbagi. Kasus Bank *Century* ini setiap saat dapat diperbincangkan diberbagai forum yang dimiliki oleh grup-grup yang ada di facebook. Dengan sekejap isu *Century* ini menjadi tema yang membangkitkan kesadaran.

Tema-tema "Penegakan Hukum", "Penuntasan Kasus *Century*", "Mega Skandal *Century*" dan sejumlah tema lainnya yang tersebar di narasi, foto, link serta status *Facebookers* yang terlibat dalam grup memunculkan tema fantasi di komunitas virtual. Hal ini termasuk fenomena baru dalam perkembangan politik di Indonesia dimana rakyat atau publik bisa menyuarakan tuntutan, desakan dengan sangat mempribadi.

Berdasarkan beberapa hal tersebut dapat dikatakan bahwasanya keberadaan media sosial itu tentu saja sangat penting untuk dapat digunakan sebagai media partisipasi politik secara online oleh masyarakat, berbagai kemudahan dan manfaat sudah tidak diragukan lagi yang mana dapat membuat masyarakat lebih dengan mudah menjalankan partisipasi politiknya. Seperti yang telah dikemukakan diatas salah satu media sosial yang sering digunakan masyarakat adalah facebook.

Dalam konteks ini, dapat juga dilihat dari fenomena yang terjadi di Desa

Cinyasag, yang mana masyarakatnya juga telah mencoba untuk memanfaatkan media sosial facebook sebagai sarana partisipasi politik digitalnya. Desa Cinyasag itu sendiri merupakan salah satu desa di Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis yang memiliki populasi penduduk sekitar 4.000 lebih jiwa orang yang mana mayoritas penduduknya adalah petani (data penduduk Desa Cinyasag 2023). Namun meskipun mayoritasnya sebagai petani sebagian warga desa Cinyasag cukup aktif menggunakan facebook, mereka memiliki grup facebook tersendiri yang bernama @Facebookna Urang Cinyasag yang beranggotakan 1,900 orang telah bergabung, selain itu sebagian dari warga juga bergabung pada akun @Apa Kabar PANAWANGAN.

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan bahwasanya partisipasi politik yang dilakukan masyarakat Desa Cinyasag ternyata terbentuk karena adanya ketidak sesuaian penyaluran bantuan sosial / BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) pada Periode Januari-Maret 2022. BPNT tersebut merupakan bantuan sembako bagi para KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang kemudian pada periode tersebut menteri sosial Tri Rismaharini telah membuat kebijakan untuk mengubah program sembako tersebut disalurkan secara tunai (berupa uang). BPNT periode Januari-Maret 2022 tersebut disalurkan melalui PT. Pos Indonesia yang kemudian dikoordinasikan oleh petugasnya bertempat di kantor desa.

Akan tetapi pada penyaluran kloter pertama masyarakat merasa kecewa, hal tersebut karena apa yang seharusnya mereka terima tidak sesuai dengan

apa yang mereka dapatkan, masyarakat harusnya menerima uang tunai sebesar RP. 600.000 akan tetapi para petugas mewajibkan masyarakat untuk menukar/membelanjakan uang tersebut dengan bahan sembako paketan yang telah disiapkan, masyarakat hanya diperkenankan menerima uang tersebut untuk kebutuhan dokumentasi dan setelah itu uang tersebut dimintai kembali oleh petugas.

Penyaluran yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan keputusan Kemensos yang telah menerbitkan petunjuk teknis, yaitu sesuai dengan keputusan Direktur Jendral Penanganan Fakir Miskin No: 29/6/SK/HK/.01/2/2022 tentang petunjuk Teknis Percepatan Penyaluran Bantuan Program Sembako Periode Januari, Februari dan Maret tahun 2022 : menyebutkan bahwa pemanfaatan bantuan program sembako untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan. Bahan pangan yang dimaksud tersebut diantaranya merupakan karbohidrat, protein hewani, protein nabati serta vitamin yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing serta bantuan tersebut dapat dibelanjakan kapan saja dan dimana saja (Finaldi, 2022).

Adanya permasalahan tersebut membuat berbagai macam reaksi masyarakat di media sosial facebook, sebagian masyarakat memberikan berbagai pendapatnya serta berbagai protes di akun media sosial facebook masing-masing serta memberikan keluhan di grup facebook Desa Cinyasag tersebut, yang mana masyarakat berupaya menyalurkan aspirasi/protes disana untuk dapat mempengaruhi kebijakan dalam penyaluran BPNT tersebut.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa Cinyasag telah melakukan partisipasi politik digitalnya melalui media sosial facebook terkait permasalahan diatas.

Dengan adanya fenomena dan apa yang telah dijabarkan diatas maka membuat penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana partisipasi politik digital yang dilakukan oleh masyarakat desa Cinyasag tersebut, hal tersebut karena gerakan yang dilakukan oleh warga Desa Cinyasag yaitu berpartisipasi politik untuk mempengaruhi kebijakan yang tidak sesuai merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan warga khususnya di daerah pedesaan yang jauh dari pemerintah pusat, selain itu penulis juga merasa bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan juga agar dapat memberikan gambaran ataupun menjadi model bagi daerah lainya yang merasakan fenomena yang serupa, sehingga dengan begitu dapat melakukan gerakan yang sama ataupun gerakan yang lebih baik lagi dalam melakukan partisipasi politik. Maka, penulis akan mengangkat penelitian yang berjudul **“Partisipasi Politik Masyarakat Desa Cinyasag Kecamatan Panawangan Melalui Media Sosial Facebook Terkait Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Periode Januari-Maret 2022”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini ialah bagaimana partisipasi politik masyarakat Desa Cinyasag Kecamatan Panawangan melalui media sosial facebook terkait peyaluran bantuan pangan non tunai periode Januari-

Maret 2022?

1.3. Pembatasan Masalah

Agar dalam tulisan ini tidak keluar dari tujuan penulis serta memudahkan dalam mendapatkan data informasi, maka penulis membatasinya dalam konteks partisipasi politik masyarakat Desa Cinyasag Kecamatan Panawangan melalui media sosial facebook terkait penyaluran bantuan non tunai periode Januari-Maret 2022.

1.4. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta memahami bagaimana peranan facebook yang dijadikan sarana partisipasi politik masyarakat Desa Cinyasag Kecamatan Panawangan terkait penyaluran bantuan pangan non tunai periode januari-maret 2022.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan sebagai kajian politik terutama dalam pengembangan serta pemecahan masalah sosial politik yang berkembang di ranah media sosial.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya yang sejenis berkaitan dengan penggunaan media sosial sebagai media partisipasi politik digital /online.